

Dampak Pendidikan Pancasila terhadap Pemahaman Siswa tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Supratman Jayadi¹, Ardilansari², Isnaini³, Maemunah⁴, Deviana Mayasari⁵,
Alihardi Winata⁶

^{1,3,4,5,6}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

supratmanjayadi123@gmail.com¹, ardilansari@gmail.com², bungisnainiibrahim@gmail.com³,

maemunah.mahmudabdullah@gmail.com⁴, devianamayasari.dm@gmail.com⁵,

alihardi.winata.s.pd@gmail.com⁶

Kata Kunci:

Pendidikan Pancasila;
Demokrasi;
Hak Asasi Manusia.

Abstrak: Pendidikan Pancasila memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan yang holistik, pendidikan Pancasila juga memperkuat kesadaran siswa akan hak asasi manusia dan pentingnya melindungi hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak pendidikan Pancasila terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi dan hak asasi manusia seperti: Meningkatnya pemahaman siswa tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan mengetahui sejauh mana siswa memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merancang strategi yang lebih efektif dalam mengajar dan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia kepada siswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian SLR untuk mengumpulkan berbagai literatur atau jurnal. Hasil Penelitian ini bahwa Pendidikan Pancasila menempati peranan paling penting dalam pembentukan karakter bangsa karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila dapat disebut sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada siswa sebagai kegiatan praktik kehidupan yang demokratis dengan tujuan agar mereka mengetahui dan memahami bagaimana proses politik suatu Negara. Dalam konteks hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting.

Keywords:

Pancasila Education;
Democracy;
Human Rights.

Abstract: Pancasila education has a significant impact on students' understanding of democracy and human rights. Through a holistic approach, Pancasila education also strengthens students' awareness of human rights and the importance of protecting those rights in everyday life. The purpose of this research is to determine the impact of Pancasila education on students' understanding of democracy and human rights, such as an increase in students' understanding of democracy and human rights. By knowing the extent to which students understand these concepts, we can identify areas that need improvement and design more effective strategies for teaching and introducing the values of democracy and human rights to students. This research uses a systematic literature review (SLR) to collect various literature or journals. The results of this study indicate that Pancasila education plays the most important role in shaping the character of the nation because Pancasila is the foundation of the Indonesian state. Pancasila education can be seen as a process that provides opportunities for students to engage in democratic life practices with the aim of knowing and understanding the political processes of a country. In the context of human rights, Pancasila values such as social justice, democracy, and fair and civilized humanity serve as important foundations.

Article History:

Received : 28-07-2023

Online : 16-08-2023



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dibidang informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan dunia semakin transparan, Berkurangnya pemahaman siswa tentang demokrasi yang disebabkan oleh pesatnya teknologi. Hal ini akan sangat mempengaruhi pemikiran, mental, dan sikap generasi muda yang menjadi harapan generasi penerus bangsa. Terkait dengan hal tersebut, seluruh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia, perlu dibekali pendidikan kewarganegaraan dengan pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara secara baik dan dinamis, guna menumbuhkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negaranya, serta menumbuhkan jiwa patriotisme yang luhur terhadap bangsa dan negara Indonesia (Asyari & Dewi, 2021).

Pendidikan Pancasila menempati peranan paling penting dalam pembentukan karakter bangsa karena pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok dalam berpikir dan berbuat. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik harus dipikirkan terlebih dahulu baik buruknya agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain (Nurgiansah, 2022). Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. System pemerintahan demokrasi telah diterima oleh hamper seluruh Negara di dunia. memiliki tiga unsur utama, yaitu: adanya kemauan politik sebuah Negara (*state*), adanya kemauan yang kuat dari politik masyarakat (*political society*), dan adanya *civil society* yang kuat dan mandiri. Ketiga unsur ini diproses dalam sebuah negara dengan tujuan untuk menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan umum yang dilangsungkan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (Rosyad & Indramayu, 2020). Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak asasi manusia merupakan sebuah tiang yang sangat penting dalam menopang tegaknya sebuah negara demokrasi. Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sangatlah penting di tanamkan bagi semua masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (R. Arifin & Lestari, 2019).

Beberapa penelitian tentang dampak pendidikan Pancasila terhadap pemahaman siswa tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia telah banyak dilakukan, seperti ; (Khaldia Berlian & Anggraeni Dewi, 2021), (Widiyanto, 2023), (Bramantyo & Suwarno, 2020), (Puspita, 2021), (Muttaqin, 2019), (Hs, 2019), (Rosmauli Jerimia Fitriani, dkk, 2021), (A. Arifin, 2021), (Tuti & Afrimetty, 2021), (Handayani & Kusumarini, 2022). (Puspita, 2021) meneliti bahwa, Dampak Pendidikan Pancasila sebagai Pelaksanaan demokrasi di SMP Negeri 5 Batang sudah berjalan lumayan baik, hal itu di buktikan dengan pihak sekolah memberikan jabatan kepada siswa sebagai suatu perkumpulan yang bertujuan untuk mendidik siswa agar lebih adil, cakap, dan sadar satu sama lain sehingga dapat diandalkan untuk membantu sebagai Sebuah pengaturan, Strategi itulah yang di berikan oleh guru untuk bisa menanamkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, agar siswa dapat menerapkannya dilingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. (Rosmauli Jerimia Fitriani, dkk, 2021) meneliti bahwa, Masalah yang terjadi pada siswa-siswa di SMP Negeri 2 Limboto ialah kurangnya pemahaman siswa dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi sehingga sikap dan prilaku yang menjunjung nilai-nilai demokrasi sangat jarang mewarnai kegiatan siswa sehari-hari, hal ini terlihat dari kurangnya keberanian para siswa dalam mengungkapkan pendapatnya, kurang toleransi, tidak kreatif, tidak mampu berpikir kritis. Demikian pula pada saat pembelajaran respon siswa sangat kurang, mereka lebih banyak diam daripada menjawab

pertanyaan-pertanyaan guru tentang materi yang diajarkan. penerimaan materi tidak dilakukan oleh siswa.

(Handayani & Kusumarini, 2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Sosialisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia DI Sekolah Dasar” meneliti bahwa, Pendidikan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Melalui pemahaman pentingnya hak asasi manusia sejak dini dapat menumbuhkan karakter anak untuk bisa menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Pendidikan yang dilakukan bertujuan memberi pengetahuan kepada anak betapa pentingnya hak asasi manusia yang akan mendorong untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. (Ham, 2019) meneliti bahwa, pada era sekarang doktrin tentang HAM sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*, pendidikan Pancasila sebagai salah satu senjata ampuh untuk memahami tentang Hak Asasi Manusia.

Pentingnya melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak pendidikan Pancasila terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi dan hak asasi manusia seperti ; Meningkatnya pemahaman siswa tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan mengetahui sejauh mana siswa memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merancang strategi yang lebih efektif dalam mengajar dan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia kepada siswa. Penelitian ini juga dapat Mengukur efektivitas pendidikan Pancasila dalam membantu mengukur sejauh mana pendidikan Pancasila berhasil dalam mengembangkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Dari pentingnya penelitian diatas dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu; Untuk mengukur sejauh mana siswa memahami konsep-konsep demokrasi dan hak asasi manusia setelah menerima pendidikan Pancasila. Dengan penelitian ini, kita dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemahaman siswa dan mengidentifikasi area-area di mana mereka mungkin memerlukan peningkatan pemahaman. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses demokrasi. Dengan memahami dampak pendidikan Pancasila pada pemahaman siswa, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi siswa dan merancang langkah-langkah yang dapat mendorong partisipasi mereka yang lebih besar dalam kehidupan demokratis.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Yang dilakukan peneliti dalam menggunakan metode SLR ini, yaitu; mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan semua semua penelitian yang tersedia. Untuk merampungkan penelitian ini, peneliti mengumpulkan artikel jurnal pada database Google Scholar. Kata kunci adalah Pendidikan Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Artikel yang dikumpulkan hanya artikel yang dipublikasikan rentang waktu 2018-2023 dan memilih artikel yang kaitannya erat dengan kata kunci yang digunakan. Langkah selanjutnya peneliti mengelompokkan artikel-artikel yang berhubungan dengan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Setelah mengelompokkan 50 artikel-artikel tersebut, peneliti meriview dan menganalisis artikel tersebut secara mendalam terutama mengenai hasil penelitian. Pada bagian akhir peneliti membandingkan temuan yang

tersaji dalam artikel kemudian mengambil kesimpulan yang selanjutnya menulis kesimpulan tersebut kedalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia. Kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "lima prinsip" atau "lima dasar". Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Bangsa Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam pidato "Lahirnya Pancasila" yang disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila kemudian dijadikan dasar dan ideologi negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima prinsip Pancasila secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama serta menghormati keragaman agama dan keyakinan di Indonesia.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati martabat, hak asasi, kesetaraan, dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- c. Persatuan Indonesia: Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai keragaman suku, agama, ras, dan golongan, serta memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Prinsip ini menekankan pentingnya sistem demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan sosial.
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Prinsip ini menuntut adanya distribusi kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila sebagai dasar negara mengikat semua warga negara Indonesia, pemerintah, dan lembaga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat di setiap jenjang Pendidikan. Salah satu tujuan mata pelajaran PPKn adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Tuti & Afrimetty, 2021).

2. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada tanggal 9 Juni 1966. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara diperkuat dengan keluarnya ketetapan MPR No.XVIII tahun 1998 tentang penegasan pancasila sebagai dasarnegara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dipoyudo mengemukakan bahwa negara Pancasila merupakan suatu negara yang dikembangkan dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang

sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah (Sari & Ulfatun Najicha, 2022).

3. Pendidikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi

Pendidikan Pancasila dapat disebut sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada siswa sebagai kegiatan praktik kehidupan yang demokratis baik di kelas, sekolah, maupun di masyarakat dengan tujuan agar mereka mengetahui dan memahami bagaimana proses politik suatu Negara berlangsung sehingga siswa mampu berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan nilai-nilai demokrasi dalam Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi suatu instansi pendidikan merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Pendidikan Pancasila dipandang memiliki peranan penting dalam strategis pembentukan nilai-nilai demokrasi pada siswa, pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan, unntuk itu pendidikan pancasila dipandang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembentukan nilai-nilai demokrasi (Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, 2021). Sebagai landasan demokrasi, nilai-nilai Pancasila yang kuat dapat menjadikan masyarakat paham akan pentingnya demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut. Pendidikan Pancasila menjadi sarana untuk membentuk sikap dan perilaku yang demokratis, menghormati perbedaan, menghargai hak asasi manusia, serta mengembangkan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan social, nilai-nilai Pancasila memberikan pijakan yang kuat dalam membangun sistem politik yang demokratis. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana setiap nilai Pancasila menjadi landasan demokrasi:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia berpegang pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks demokrasi, hal ini mencerminkan keberagaman agama dan kebebasan beragama yang dihormati. Negara tidak memaksakan satu agama tertentu kepada warganya dan mengakui hak setiap individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai ini menekankan perlunya menghormati dan melindungi hak asasi manusia serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam konteks demokrasi, nilai ini mendorong adanya kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan hak-hak individu, serta menghindari diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Demokrasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan menjamin partisipasi aktif dan kesetaraan hak setiap warga negara.
- c. Persatuan Indonesia: Nilai ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, meskipun terdapat keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam konteks demokrasi, nilai ini mengajarkan pentingnya membangun konsensus dan menghargai perbedaan pendapat dalam mencapai keputusan bersama. Partisipasi aktif dalam politik dan kehidupan masyarakat juga didorong untuk mencapai persatuan yang kuat.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Nilai ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau perwakilan yang dihasilkan secara demokratis. Dalam konteks demokrasi, nilai ini menekankan perlunya keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan sosial dan ekonomi yang adil, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks demokrasi, nilai ini mendorong distribusi yang adil, penghapusan kesenjangan sosial, perlindungan bagi kaum marginal, dan partisipasi warga dalam proses pembangunan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan negara sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga saat ini, serta praksis kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya, Karena proses demokratisasi ini menyangkut ini menyangkut partisipasi warga negara dalam proses politik, maka penyiapan warga negara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi saat ini. Sebagaimana diyakini bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari, dan dialami. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam arti luas memegang peranan yang strategis, karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang demokratis untuk berbagai usia. Proses demokratisasi yang harus dikembangkan bukanlah hanya untuk berdemokrasi hari ini, tetapi lebih jauh lagi untuk berdemokrasi di hari esok (Nufikha et al., 2021).

4. Peran Pendidikan Pancasila dalam membangun kesadaran akan hak asasi manusia

Peran Pendidikan Pancasila dalam membangun kesadaran akan hak asasi manusia adalah sangat penting. Berikut adalah peranan penting pendidikan Pancasila dalam hal tersebut:

- a. Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila: Pendidikan Pancasila merupakan wadah untuk mengenalkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada generasi muda. Dalam konteks hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting. Pendidikan ini memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Peningkatan Kesadaran: Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik diajarkan untuk menghargai, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Mereka diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, kesadaran peserta didik tentang pentingnya hak asasi manusia ditingkatkan.
- c. Pengenalan Konsep Kesetaraan: Pendidikan Pancasila mengajarkan konsep kesetaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Peserta didik diberi pemahaman bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi. Mereka diajarkan untuk menghormati keberagaman dan menolak segala bentuk diskriminasi, seperti diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pendidikan ini memperkuat konsep kesetaraan dalam membangun kesadaran akan hak asasi manusia.
- d. Pembentukan Sikap Menghormati HAM dalam Kehidupan Sehari-Hari: Pendidikan Pancasila tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak asasi manusia, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diajarkan untuk menghargai hak-hak orang lain dan untuk

tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya pendidikan ini, peserta didik dapat membangun sikap positif yang mementingkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam interaksi sosial mereka.

- e. Mempersiapkan Generasi yang Peduli terhadap Hak Asasi Manusia: Pendidikan Pancasila berperan dalam membentuk generasi yang peduli terhadap hak asasi manusia. Melalui pendidikan ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap empati, kepedulian, dan keberanian untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Mereka diajarkan untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia di lingkungan sekitar mereka.

Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membangun kesadaran akan hak asasi manusia dan membentuk generasi yang menghormati serta melindungi hak-hak asasi manusia. Pendidikan Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berintegritas, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan global, pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila bukan hanya mengenalkan nilai-nilai, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Amelia et al., 2023).

5. Tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan pendidikan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

a. Tantangan Kekinian

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan walaupun sudah satu dasawarsa reformasi berjalan, tantangan tersebut kalau diidentifikasi sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pementapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- 2) Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat.
- 3) Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah, sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.

- 4) Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
- 5) Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
- 6) Masih berlangsungnya pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
- 7) Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
- 8) Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.
- 9) Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Solusi Menghadapi Tantangan

Dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini perlu ada arah kebijakan yang merupakan solusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar memperkuat kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Arah kebijakan tersebut sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
- 2) Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
- 3) Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan. Menegakkan supremasi hukum dan perundangundangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Memahami Pancasila sebagai ideologi negara, harus dipahami bersama dengan membuka wacana dan dialog di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan Indonesia masa depan. Pada kenyataannya, pemahaman akan warisan luhur bangsa sampai saat ini belum dipahami oleh semua generasi bangsa. Bangsa Indonesia selayaknya bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional, yang dapat diterima semua paham, golongan dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ronto, 2012).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dari Pembahasan yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan : (1). Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila mengikat semua warga negara dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (2). Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan penegasan MPR No.XVIII tahun 1998. Negara Indonesia merupakan negara Pancasila yang dikembangkan dan dipertahankan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara. (3). Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membangun kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Melalui pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi, seperti kebebasan beragama, penghargaan terhadap hak asasi manusia, persatuan bangsa, partisipasi aktif dalam kehidupan politik, dan keadilan sosial. (4). Pendidikan Pancasila juga berperan dalam membangun kesadaran akan hak asasi manusia. Melalui pendidikan ini, siswa diberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar Pancasila yang mencerminkan pentingnya menghargai, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Pendidikan ini juga membentuk sikap menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun Saran dalam pembahasan jurnal tentang Dampak Pendidikan Pancasila terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi dan Hak Asasi Manusia meliputi: (1) Meningkatkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam sistem pendidikan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan peranannya dalam membangun demokrasi dan kesadaran akan hak asasi manusia. (2) Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan formal dan non-formal, serta melibatkan guru dan pendidik dalam penanaman nilai-nilai tersebut kepada siswa. (3).Melakukan pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi guru PPKn untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan materi Pancasila dengan efektif dan menarik bagi siswa. (4) Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan diskusi yang membahas nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tersebut. (5) Mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial dan politik di sekolah dan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman dan pengalaman praktis dalam demokrasi dan hak asasi manusia. (6) Membangun kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam memperkuat pendidikan.

REFERENSI

Amelia, R., Nur, P., Truvadi, L. A., & Agustina, R. T. (2023). *Peran Pendidikan Pancasila dalam*

- Membentuk Karakter Bangsa Indonesia : Tinjauan dan Implikasi.* 1(4), 501–510.
- Arifin, A. (2021). Persepsi Siswa Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Research and Development Journal of ...*, 7(1), 226–234. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE%0Ap-ISSN>
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Asyari, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 30–41. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i2.1628>
- Bramantyo, R. Y., & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia*, 3(2), 58–66. <https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.627>
- Ham, A. M. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak. 1.
- Handayani, E. S., & Kusumarini, E. (2022). Sosialisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Sekolah Dasar. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 2(1), 74–79.
- Hs, M. Y. (2019). *Peran Guru PPKn dan Masyarakat Sekolah dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah SMPN 1 Sanggar.* 7(1).
- Khalda Berlian, R., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Muttaqin, Z. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda (Studi Kasus di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 27. <https://doi.org/10.31764/civicus.v7i2.1139>
- Nufikha, U., Yayuk, H., & Meiwatizal, T. (2021). Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 18. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1576/pdf>
- Nurgiansah, T. H. (2022). Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Religius. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7310–7316. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3481>
- Puspita, M. D. (2021). Strategi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Di Smp N 5 Batang. *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, November, 146–156.
- Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, Y. F. F. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA* ..., 5(3), 9034–9038. <https://jurnal.stkipggritrenggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/view/102%0Ahttps://jurnal.stkipggritrenggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/download/102/66>
- Ronto. (2012). Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. *Makalah Karya Tulis Ilmiah*, 8(2), 7. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=91674&val=4998>
- Rosmauli Jerimia Fitriani, dkk. (2021). Jurnal abdidas. *Jurnal Abdidas*, 1(3), 149–156.
- Rosyad, A. M., & Indramayu, U. W. (2020). Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi di indonesia. 3(1), 75–99.
- Sari, R., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Unnes*, 7(1), 53–58. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Tuti, P., & Afrimetty, D. (2021). *Hubungan Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Dengan Sikap Peserta Didik Terhadap Tindak Bullying.* 1(1), 7–12.
- Widiyanto, D. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/2826>